



## PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

### BAB II

## EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

### 2.1. EKONOMI MAKRO

#### PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAERAH

Pada tahun 2014, perekonomian nasional tumbuh melambat dibandingkan tahun 2013. Perekonomian Indonesia pada tahun 2014 tumbuh sebesar 5,03%, lebih rendah dibandingkan tahun 2013 yang tumbuh 5,58%. Meskipun secara nasional mengalami perlambatan, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selama tahun 2014 justru mengalami peningkatan yaitu sebesar 5,42% (yoy), lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya 1 sebesar 5,14% (yoy)<sup>1</sup>.

Demikian juga ekonomi Kabupaten Purbalingga tahun 2014, menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik terlihat Laju Pertumbuhan Ekonomi yang diwakili oleh pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan mengalami pertumbuhan yang cukup baik dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,21% sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purbalingga  
Tahun 2012-2014

TAHUN	HARGA BERLAKU		HARGA KONSTAN	
	Nilai	Pertumbuhan	Nilai	Pertumbuhan
	(Rp Triliun)	(%)	(Rp Triliun)	(%)
2012	7,30	11,37	2,85	6,26
2013	8,16	12,27	3,01	5,66
2014 *)	9,01	13,00	3,20	6,20
<b>Rerata</b>	<b>8,16</b>	<b>12,21</b>	<b>3,02</b>	<b>6,04</b>

\*) angka sangat sementara  
Sumber: [jateng.bps.go.id](http://jateng.bps.go.id), diolah

Selain PDRB, secara umum indikator ekonomi lainnya sangat dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah untuk melakukan pengetatan fiskal melalui kebijakan kenaikan harga BBM subsidi pada tanggal 18 November 2014 guna menekan pembengkakan subsidi BBM dalam APBN-P TA 2014.

Kenaikan harga BBM subsidi tersebut secara langsung mendorong peningkatan inflasi di Jawa Tengah di bulan November dan Desember 2014 yaitu mencapai 1,36% dan 2,25%, sebagaimana terlihat pada grafik di bawah.



Sumber: [jateng.bps.go.id](http://jateng.bps.go.id)

<sup>1</sup>Sumber : [jateng.bps.go.id](http://jateng.bps.go.id), diolah



## PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

### ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO

Sesuai Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan DPRD Kabupaten Purbalingga Nomor 903-5 Tahun 2013 dan Nomor 170-08 Tahun 2013 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014, sebagai berikut.

Tabel Asumsi Dasar Ekonomi Makro  
APBD Kabupaten Purbalingga TA 2014

Indikator	APBD 2014	APBD-P 2013
Jumlah Penduduk ( <i>jiwa</i> )	895.328	906.007
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,8	0,5
Inflasi (%)	5	7
PDRB ADHB ( <i>Rp</i> )	9.054.216.609.000	8.917.995.660.000,00
PDRB ADHK ( <i>Rp</i> )	3.187.024.270.200	3.037.636.930.000,00
Laju Pertumbuhan PDRB (%)	6	6,34

Penyusunan asumsi ekonomi makro tersebut juga mengacu kepada asumsi-asumsi ekonomi makro dalam APBN Tahun 2014, yaitu:

Tabel Asumsi Dasar Ekonomi Makro  
APBN TA2014

Indikator	APBN 2014	APBN-P 2013
Pertumbuhan Ekonomi (%) y-o-y	6,0	6,3
Inflasi (%) y-o-y	5,5	7,2
Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bulan (%) y-o-y	4,5	5
Nilai Tukar (Rp/US\$)	10.500,0	9.600,00
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barell)	105,0	108
<i>Lifting</i> Minyak Bumi (ribu barell/hari)	870,0	840
<i>Lifting</i> Gas Bumi (ribu barell setara minyak/hari)	1.240,0	1.240,0

Namun seiring dengan perkembangan berbagai indikator perekonomian, asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam APBN 2014 dinilai sudah tidak relevan lagi untuk digunakan sebagai dasar perhitungan postur pelaksanaan APBN 2014 sehingga perlu dilakukan perubahan.

Tabel Asumsi Dasar Ekonomi Makro  
APBN-PTA 2014

Indikator	APBN-P 2014	APBN 2014
Pertumbuhan Ekonomi (%) y-o-y	5,5	6,0
Inflasi (%) y-o-y	5,3	5,5
Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bulan (%) y-o-y	6,0	4,5
Nilai Tukar (Rp/US\$)	11.700,0	10.500,0
Harga Minyak (US\$/barell)	105,0	105,0
<i>Lifting</i> Minyak (ribu barell/hari)	818,0	870,0
<i>Lifting</i> Gas (ribu barell setara minyak/hari)	1.224,0	1.240,0



## PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

Perkembangan ekonomi nasional dan daerah serta perubahan asumsi dasar ekonomi makro pada APBN-P Tahun 2014 juga mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian terhadap asumsi makro ekonomi yang digunakan sebagai dasar penyusunan APBD 2014.

Tabel Asumsi Dasar Ekonomi Makro  
APBD-PKabupaten Purbalingga TA 2014

Indikator	Proyeksi 2014	Proyeksi 2015
Jumlah Penduduk ( <i>jiwa</i> )	895.328	901.595
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,8	0,7
Inflasi (%)	5	5
PDRB ADHB ( <i>Rp</i> )	9.054.216.609.000	10.095.451.519.035
PDRB ADHK ( <i>Rp</i> )	3.187.024.270.200	3.394.180.847.763
Laju Pertumbuhan PDRB (%)	6	6,5

Terkait dengan penyusunan APBD Tahun 2014, Kebijakan Umum APBD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 33 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014.

Realisasi APBD Semester I tahun 2014 menunjukkan bahwa terdapat hal-hal yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2014 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga diperlukan perubahan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014, perubahan RKPD Tahun 2014 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan diantaranya:

- Terjadinya pelampauan proyeksi pendapatan pada beberapa sumber pendapatan dan penurunan proyeksi pendapatan pada sumber pendapatan lainnya;
- Pelampauan proyeksi pembiayaan daerah;
- Penambahan dan pergeseran alokasi belanja daerah.

Oleh karena itu dilakukan perubahan Kebijakan Umum Penyusunan APBD Tahun 2014 melalui Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 903/9 Tahun 2014 dan Nomor 170-04 Tahun 2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014.

## 2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan Keuangan APBD-PTA 2014 tidak bisa dilepaskan dari perubahan asumsi ekonomi makro APBD TA 2014 maupun perubahan asumsi dasar kebijakan umum APBD-P TA 2014.

Sesuai Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 903/9 Tahun 2014 dan Nomor 170-04 Tahun 2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014, kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada APBD-P TA 2014 adalah sebagai berikut:



## PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

---

### 1. Kebijakan Pendapatan APBD-P TA 2014

- a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD, peningkatan kualitas SDM pengelola PAD, mendorong percepatan kinerja dan ketepatan setoran pendapatan;
- b. Memperkuat peran serta BUMD dalam rangka peningkatan PAD dari sektor BUMD;
- c. Peningkatan koordinasi penerimaan yang bersumber dari bagi hasil maupun dana perimbangan baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun provinsi.

### 2. Kebijakan Belanja Daerah APBD-P TA 2014

Kebijakan belanja daerah dalam APBD-P TA 2014 diarahkan pada:

- a. Pemenuhan alokasi kebutuhan anggaran belanja operasional dan belanja pegawai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan tetap melakukan peningkatan efisiensi belanja SKPD untuk belanja operasional serta melakukan penajaman komposisi belanja prioritas.
- b. Peningkatan stimulus untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui peningkatan aksesibilitas wilayah dan penyediaan infrastruktur dasar sosial dan ekonomi, dengan tetap memperhatikan perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum, serta pengembangan jaminan sosial dan perlindungan masyarakat miskin serta mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan.
- c. Pelaksanaan keberpihakan (*affirmative action*), terutama terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan serta pembangunan industri kecil dan industri kreatif.
- d. Merencanakan ulang kegiatan-kegiatan besar yang telah dianggarkan dengan memperhatikan ketercukupan waktu penyelesaian maupun sumber daya yang tersedia.

### 3. Kebijakan Pembiayaan Daerah APBD-P TA 2014

Kebijakan umum pembiayaan daerah dalam Perubahan APBD TA-2014 tetap diarahkan untuk:

- a. Pemanfaatan SILPA Tahun Anggaran 2013 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman;
- b. Penyediaan Dana Cadangan untuk Pelaksanaan Pemilukada, Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jaringan Irigasi Slinga, dan Pembangunan Jembatan Gatot Subroto;
- c. Penyertaan Modal pada PDAM;
- d. Penyertaan Modal pada PD BPR Artha Perwira;
- e. Penyertaan Modal pada PT BPRS Buana Mitra Perwira;
- f. Penyertaan Modal pada PD BPR BKK;
- g. Penyertaan Modal pada PT BPD Jateng;
- h. Penyertaan Modal pada PD Owabong.



## PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

### 2.3. PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2014 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 tentang Perubahan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2014.

Secara umum, pencapaian kinerja Kabupaten Purbalingga menunjukkan hasil yang baik terlihat dari realisasi pendapatan daerah yang melampaui target dan realisasi belanja daerah di atas 90%.

Realisasi pendapatan daerah tahun 2014 sebesar **Rp1.345.621.795.678,00** atau mencapai **102,11%** dari target sedangkan realisasi belanja daerah sebesar **Rp1.271.839.631.902,00** atau mencapai **90,02%** dari rencana. Realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah tersebut terus mengalami peningkatan sejak dari tahun 2012 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

Tabel Perkembangan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah  
Tahun 2012-2014

Uraian	2012		2013		2014	
	Pendapatan	Belanja	Pendapatan	Belanja	Pendapatan	Belanja
APBD-P	1,07	1,15	1,17	1,24	1,32	1,41
Realisasi	1,09	1,08	1,19	1,13	1,35	1,27
% Realisasi	101,61%	94,50%	101,57%	90,83%	102,11%	90,02%
% Kenaikan			9,08%	3,92%	13,41%	12,90%

(Rp triliun)

Sumber: DPPKAD Kab. Purbalingga, diolah

Realisasi belanja urusan pemerintahan wajib tahun 2014 sebesar **Rp1.226.290.270.661,00** mencapai **89,86%** dari anggaran sedangkan total realisasi urusan pemerintahan pilihan mencapai **Rp45.549.361.241,00** atau **94,51%** dari anggaran tahun 2014 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan  
Tahun 2014

Kode	Urusan	Anggaran	Realisasi	%
<b>1</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>	<b>1.364.676.078.000,00</b>	<b>1.226.290.270.661,00</b>	<b>89,86</b>
1.01	Pendidikan	663.851.121.000,00	601.121.494.879,00	90,55
1.02	Kesehatan	186.785.634.000,00	168.254.277.454,00	90,08
1.03	Pekerjaan Umum	202.439.180.000,00	180.463.235.405,00	89,14
1.04	Perumahan	525.581.000,00	410.805.550,00	78,16
1.05	Penataan Ruang	883.424.000,00	746.537.800,00	84,51
1.06	Perencanaan Pembangunan	5.806.506.000,00	5.286.253.380,00	91,04
1.07	Perhubungan	10.539.671.000,00	7.895.273.114,00	74,91
1.08	Lingkungan Hidup	4.518.697.000,00	4.473.512.035,00	99,00
1.09	Pertanahan	10.220.306.000,00	6.200.069.693,00	60,66
1.10	Kependudukan dan Catatan Sipil	3.836.473.000,00	3.649.360.011,00	95,12
1.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	693.350.000,00	679.995.100,00	98,07
1.12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	8.394.706.000,00	8.343.579.089,00	99,39
1.13	Sosial	6.144.920.000,00	5.459.012.143,00	88,84
1.14	Ketenagakerjaan	4.357.253.000,00	4.235.395.254,00	97,20
1.15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	7.434.452.000,00	7.179.739.424,00	96,57
1.16	Penanaman Modal	2.070.579.000,00	1.934.609.561,00	93,43
1.17	Kebudayaan	1.871.929.000,00	1.769.741.000,00	94,54
1.18	Pemuda dan Olah Raga	4.792.367.000,00	702.845.500,00	14,67
1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	7.919.486.000,00	7.876.804.281,00	99,46
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AKD	219.320.478.000,00	197.631.799.005,00	90,11



## PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

Kode	Urusan	Anggaran	Realisasi	%
1.21	Ketahanan Pangan	1.801.400.000,00	1.792.651.179,00	99,51
1.22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.868.484.000,00	5.724.965.652,00	97,55
1.23	Statistik	727.423.000,00	710.879.630,00	97,73
1.24	Kearsipan	329.550.000,00	325.038.150,00	98,63
1.25	Komunikasi dan Informatika	1.524.443.000,00	1.441.364.506,00	94,55
1.26	Perpustakaan	2.018.665.000,00	1.981.031.866,00	98,14
<b>2</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>	<b>48.196.330.000,00</b>	<b>45.549.361.241,00</b>	<b>94,51</b>
2.01	Pertanian	27.251.977.000,00	27.007.001.663,00	99,10
2.02	Kehutanan	1.413.748.000,00	1.374.383.000,00	97,22
2.03	Energi dan Sumberdaya Mineral	3.050.386.000,00	2.563.826.850,00	84,05
2.04	Pariwisata	4.170.005.000,00	3.991.330.870,00	95,72
2.05	Kelautan dan Perikanan	3.063.554.000,00	3.036.268.700,00	99,11
2.06	Perdagangan	8.008.190.000,00	6.373.685.408,00	79,59
2.07	Perindustrian	1.132.891.000,00	1.116.358.250,00	98,54
2.08	Ketransmigrasian	105.579.000,00	86.506.500,00	81,94
	<b>Jumlah</b>	<b>1.412.872.408.000,00</b>	<b>1.271.839.631.902,00</b>	<b>90,02</b>